



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD ARFAN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 473456

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m²/160 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
2. Tanah Seluas 120 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/40 m² di KAB / KOTA GOWA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 4052 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN Rp. 160.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/42 m² di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 70000 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
7. Tanah Seluas 8875 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
8. Tanah Seluas 2644 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 94.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA G Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 172.700.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.959.168
F. HARTA LAINNYA	Rp.	140.000.000
Sub Total	Rp.	1.707.659.168
III. HUTANG	Rp.	101.779.595
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.605.879.573

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.